

## Kota Bandung Masifkan Pasar Murah Antisipasi Kenaikan Harga

**BANDUNG (IM)**- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat, memasifkan operasi pasar murah untuk masyarakat sebagai upaya mengantisipasi kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok menjelang Ramadhan 2023 atau 1444 Hijriah.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan bahwa operasi pasar murah digelar di 151 kelurahan. Wilayah yang sudah menggelar operasi pasar murah di antaranya Kelurahan Kacapiring, Kota Bandung.

"Ini dilakukan di 151 kelurahan se-Kota Bandung. Bergantian ya, karena menyesuaikan kesiapan teman-teman kewilayahan," kata Yana di Bandung, Senin (20/2).

Menurutnya komoditas yang dijual dalam operasi pasar murah itu yakni paket kebutuhan pokok dengan harga murah. Dalam paket itu berisi beberapa komoditas seperti ikan, telur, beras, minyak, gula, hingga garam. Pasar murah itu merupakan upaya membentengi pasar dengan komoditas yang harganya rentan mengalami ketidakstabilan. Dia berharap

dengan banyaknya stok sejumlah komoditas di tengah masyarakat harga bisa ditekan. "Ini terus dilaksanakannya di 151 kelurahan, ini diatur waktunya sampai mendekati hari besar," kata dia.

Untuk operasi pasar murah di Kelurahan Kacapiring, menurutnya ada 1.000 paket komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang dijual dengan harga murah. Yana menjelaskan sebanyak 7 jenis paket dijual dalam operasi pasar murah itu dengan komoditas yang beragam. Namun di setiap paket itu terdapat komoditas ikan, mulai dari ikan patin, ikan kembung, hingga ikan bawal.

Yana menjelaskan komoditas ikan itu disisipkan sebagai langkah Pemkot Bandung untuk menekan angka stunting pada anak karena ikan memiliki gizi yang tinggi apabila dikonsumsi. "Mudah-mudahan berdampak pada penurunan stunting, kan makanannya bergizi, dengan harga terjangkau," kata dia. ● **pra**

## Gedung Kesenian Jadi Sentra Kuliner dan Kantong Parkir Situ Plaza

**CIBINONG (IM)**- Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Iwan Setiawan akan membangun pusat perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Pusat perekonomian masyarakat berupa sentra kuliner dan kantong parkir itu dibangun dengan merevitalisasi gedung kesenian Kabupaten Bogor.

"Dengan adanya kantong parkir akan lebih tertata," kata Iwan di Cibinong, Sabtu (18/2) lalu.

Iwan mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah menyiapkan anggaran revitalisasi gedung itu sekitar Rp1 miliar dari APBD 2023.

Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan menggandeng pihak swasta dalam mengembangkan sentra kuliner dan kantor parkir di kawasan perkantoran pemerintah daerah tersebut. Iwan mengatakan anggaran dari APBD tidak akan cukup untuk membangun pusat perekonomian masyarakat itu sehingga perlu menggandeng pihak ketiga.

"Ya di tenant-tenantnya itu kita bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, siapa tau ada yang melirik di situ parkir bagus juga. Itu lebih efektif," kata Iwan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra mengatakan pusat perekonomian masyarakat itu akan terintegrasi dengan Taman Cibinong Situ Plaza di seberangnya.

Suryanto mengatakan dengan adanya sentra kuliner dan kantong parkir di bekas gedung kesenian itu, para pengunjung Taman Cibinong Situ Plaza tidak lagi kesulitan mencari tempat parkir. Pada saat ini Situ Plaza sudah bisa dikunjungi, namun tidak ada lahan parkir pengunjung.

"Kawasan Situ Plaza sekarang sudah ada arena bermainnya, sehingga kami harus segera menyiapkan sarana dan prasarannya seperti kantong parkir," kata Suryanto.

Menurut Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor itu, lokasi gedung kesenian sangat tepat dijadikan kantong parkir. Sebelumnya, gedung itu dipinjam Polres Bogor sebagai tempat parkir kendaraan. "Sekarang sudah selesai masa pinjamnya. Nanti kami bangun itu ada galerinya dan tempat parkir," ujarnya. ● **gio**

SEBAGAI WUJUD BOGOR BERKEADABAN

## Plt. Bupati Bogor Minta Prasarana Haji Ditingkatkan



Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan silaturahmi akbar bersama Calon Haji (Calhaj) Kabupaten Bogor.

**BOGOR (IM)**- Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan meminta agar meningkatkan sarana prasarana layanan haji guna mewujudkan pelayanan haji dan umroh terpadu di Kabupaten Bogor, serta mendorong terwujudnya Karsa Bogor Berkeadaban.

Hal itu diungkapkan Iwan Setiawan dalam kegiatan silaturahmi akbar dengan para calon jamaah haji yang mengusung tema "Literasi Haji dalam Pembinaan membangun Bogor Berkeadaban" dilaksanakan di Gedung Tegar Beriman, Sabtu (18/2) lalu.

Iwan Setiawan menyampaikan bahwa jamaah haji Kabupaten Bogor merupakan jamaah haji yang terbesar di Indonesia, dan tentunya harus bangga menjadi jamaah haji dari Kabupaten Bogor. Untuk itu dirinya akan terus meningkatkan sarana prasarana fasilitas layanan haji di Kabupaten Bogor.

"Baik itu fasilitas proses

manasik haji, proses pemberangkatan dan kepulangan, Pemdab Bogor juga memfasilitasinya," ujar Iwan Setiawan.

Dalam kesempatan ini, Iwan Setiawan juga mengucapkan terima kasih kepada Forum Komunikasi Bimbingan Ibadah Haji Umroh (KBIHU) Kabupaten Bogor, yang sudah mencerdaskan dan membimbing warga Kabupaten Bogor yang akan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh dan juga berencana memberikan lahan seluas 2 hektar untuk pelayanan dan pembinaan haji umroh bagi jamaah haji Kabupaten Bogor.

"Terima kasih kami sampaikan pada pak Plt. Bupati yang tanahnya sudah kita survei daerah Bojong Koneng, Alhamdulillah bapak ibu sekalian, mudah-mudahan bisa terwujud pelayanan haji dan ibadah terpadu yang ada di Kabupaten Bogor," harapnya. ● **gio**

# 8 | Nusantara



Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan memukul gong saat membuka Muskab IX Apindo di Hotel M One, Senin (20/2).

## Pemkab Bogor Pastikan Kabupaten Bogor Dijamin Aman dan Nyaman Berinvestasi

Sebagai daerah yang dekat dengan ibu kota, Kabupaten Bogor memiliki beberapa kelebihan yang dapat menarik para pengusaha untuk berinvestasi. Juga sebagai daerah bufferzone-nya ibu kota, pastinya Kabupaten Bogor punya kelebihan dari aksesibilitas, sumber daya manusia, dan aspek lainnya yang lebih mendukung, daripada wilayah yang jauh dari ibu kota.

**BOGOR (IM)**- Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, agar para pengusaha nyaman berinvestasi di Kabupaten Bogor.

Hal itu dikatakan Iwan Setiawan, saat membuka Mus-

ab Kabupaten (Muskab) IX Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bogor, di M-One Hotel, Sukaraja, Senin (20/2).

Iwan Setiawan menjelaskan, sebagai daerah yang dekat dengan ibu kota, tentunya Kabupaten Bogor memiliki beberapa kelebihan

yang dapat menarik para pengusaha untuk berinvestasi.

"Sebagai daerah bufferzone-nya ibu kota, pastinya punya kelebihan dari aksesibilitas, sumber daya manusia, dan aspek lainnya yang lebih mendukung, daripada wilayah yang jauh dari ibu kota," jelas Iwan.

Sementara Ketua DPP APINDO Provinsi Jawa Barat, Ning W. Astuti mengatakan, bahwa semua harus bersinergi, baik itu dengan rekan-rekan serikat pekerja maupun dengan pemerintah daerah berkolaborasi agar pengusaha bisa bertahan. Tidak hanya bertahan saja namun bisa berkembang.

"Melalui Muskab kali ini saya sangat berharap, siapapun ketua DPK APINDO Kabupaten Bogor yang nantinya terpilih, dapat lebih mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di organisasi

dan dapat lebih memperkuat solidaritas organisasi," kata Ning W. Astuti.

Untuk itu semuanya harus meningkatkan solidaritas, tidak hanya internal tetapi juga eksternal. Mudah-mudahan dengan para serikat pekerja juga komunikasinya berjalan dengan baik dan lancar. Itulah yang saya harapkan dari kepemimpinan yang baru, katanya.

Sedangkan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checwati memaparkan, Kadin dan APINDO sejatinya adalah pemilik DNA yang sama, yakni DNA pengusaha, dan sama-sama sudah ditempa melalui waktu yang cukup lama.

"Lamanya waktu tersebut melahirkan Kadin dan APINDO yang sudah dewasa, mempunyai pengalaman yang cukup. Insya Allah secara bersama-sama kita dapat melalui tahun yang berat ini,"

paparnya.

Sintha menggambarkan bahwa sejarah membuktikan dalam rentang waktu sejak APINDO dan Kadin didirikan sampai saat ini, telah terjadi tidak hanya sekali keadaan yang berat bagi dunia usaha, karena krisis ekonomi, politik dan keamanan, tetapi alhamdulillah berkat kerja keras dan kerjasama dan ridho Allah, kita semua dapat melaluinya.

"Mari kita bersama-sama membangun dan memperkuat optimisme disertai kerja keras dan kerjasama, sehingga kita dapat melalui tahun yang berat ini, bahkan kita harus yakin bahwa kita bisa lebih maju," tutur Sintha Dec Checwati.

Acara ini dihadiri oleh Ketua DPK APINDO Kabupaten Bogor, para Ketua DPC Serikat Pekerja, jajaran anggota DPK APINDO Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor. ● **gio**

## Bahas Renja 2023, Komisi I Gelar Raker dengan Camat se-Kota Bogor

**BOGOR (IM)**- Komisi I DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja (Raker) dengan camat se-Kota Bogor, meminta dan membahas laporan rencana kerja (Renja) di tahun 2023 terkait pembangunan di wilayah.

Dalam rapat yang dihelat Rabu (15/2) ini hadir, Ketua Komisi I, Heri Cahyono, Wakil Ketua Komisi I, Anna Mariam Fadhilah, Sekretaris Komisi I Fajar Arya Sugiarto beserta anggota Komisi I Ade Azkiah, Endah Purwanti, Siti Maesaroh, Ence Setiawan dan H. Mulyadi.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, menyebutkan berdasarkan hasil rapat pembangunan dan program di tahun akhir kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya, belum ada pemerataan pembangunan di wilayah. Sebab, proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja. Hal ini terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini, pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi.

"Jadi tadi camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang harusnya disegerakan

ini tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan. Bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat," jelas Anna dalam keterangannya, Senin (20/2).

Lebih lanjut, politisi PKS ini pun meminta kepada Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor untuk segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.

"Menurut kami kantor kelurahan itu menjadi penting karena kantor kelurahan adalah representatif pemerintah kota bogor yang berada di wilayah. Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa dibenarkan anggaran," tegasnya.

Tak hanya itu, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor.

Anna menyebutkan berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka Rp75 juta. Padahal, dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji untuk menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan.

"Tadi kita lihat ternyata perjuangan kami menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan belum terealisasi kami sangat sedih. Saya rasa ini tergantung prioritas dan political will dari pemimpin daerah, nah kami sebagai DPRD tentu akan terus menyuarakan kebutuhan warga ini," jelas Anna. "Sekaligus kami akan memperjuangkan untuk menaikkan anggaran BOP RT, RW dan LPM yang sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan," sambungnya. Berdasarkan hasil rapat ini, nantinya Komisi I DPRD Kota Bogor akan membuat rekomendasi dan menyampaikannya ke forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor agar bisa ditindaklanjuti dengan TAPD. ● **jay**



PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK DI SEKOLAH

Siswa mengikuti perekaman data untuk pembuatan KTP elektronik di SMKN 2 Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (20/2). Disdukcapil Kota Bogor mendatangi sejumlah sekolah untuk melakukan perekaman data KTP elektronik dengan menargetkan sebanyak 21 ribu pelajar guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024.

## Hujan Deras, Longsor Timpa 4 Rumah di Cigombong Bogor

**BOGOR (IM)**- Longsor terjadi di Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini, hanya empat rumah milik warga mengalami rusak berat.

Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaludin mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu (19/2). Longsor disebabkan curah hujan tinggi ditambah tidak ada saluran air.

"Telah terjadi longsor pada tebingan (TPT) teras dan kamar dengan posisi rumah yang berdekatan dikarenakan hujan kurun waktu cukup lama ditambah tak adanya saluran pembuangan air membuat tanah berada di atasnya gembur," kata Jalal, Senin (20/2).

Longsor ini memiliki panjang sekitar 10 meter dengan tinggi 8 meter. Dalam kejadian ini, terdampak 4 rumah milik warga yang dihuni 4 KK dengan 17 jiwa mengalami kerusakan berat. "Ada juga dua rumah yang terancam," jelasnya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Hanya saja warga yang rumahnya rusak berat menunggu sementara ke sanak saudaranya. "Korban jiwa nihil," tambah Jalal.

Saat ini, material longsor belum dibersihkan karena di lokasi masih rawan longsor. Untuk sementara, petugas memasang terpal di lokasi kejadian. Hasil analisa anggota di lokasi perlu penanganan lebih lanjut dari dinas terkait mengingat kondisi tanah yang masih labil. ● **gio**

## 351 Pemdes Sudah Serahkan LPI Samisade

**BOGOR (IM)**- Sebanyak 351 dari 413 pemerintah desa (Pemdes) sudah menuntaskan laporan program bantuan keuangan infrastruktur desa atau satu miliar satu desa (Samisade) tahun anggaran 2022. Jika dihitung dari segi presentase, maka 85,19 persen Pemdes sudah 100 persen menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya (LPI) program Samisade. Sementara 14,81 persen lainnya hanya tinggal menyerahkan LPI.

"Saat ini, 351 Pemdes sudah menyerahkan LPI program Samisade. Sementara 62 Pemdes lainnya LPInya masih dalam tahap verifikasi faktual di pemerintah kecamatan (Pemcam) setempat," kata Kepala Dinas Perbendaharaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah kepada wartawan, Senin (20/2).

Renaldi Yushab Fiansyah optimistis, anggaran program bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade Tahun

2022 sebesar Rp 365 miliar terserap hingga 100 persen.

"Kami optimis anggaran bisa terserap 100 persen, apalagi semua pekerjaan fisiknya sudah selesai dan hanya menunggu LPI-nya," terang Renaldi Yushab Fiansyah.

Mantan Asisten Pemerintahan ini menuturkan selain untuk membangun infrastruktur jalan, jembatan dan tanggul penahan tanah, anggaran bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade juga untuk membangun menara telekomunikasi. "Selama dua tahun anggaran, sudah 18 menara telekomunikasi dibangun oleh Pemdes. Hal itu dilakukan agar warga desa tetap bisa belajar online, bisa membantu usaha dan lain sebagainya hingga mereka tidak ketinggalan informasi serta teknologi," tuturnya.

Pasca verifikasi faktual, Renaldi menjelaskan bahwa Inspektorat akan melakukan uji petik pemeriksaan LPI beserta realita pembangunan di lapangan atau desa-desa. ● **gio**